



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1150, 2019

KEMENPORA. Sistem Klasifikasi Keamanan. Akses  
Arsip Dinamis Kementerian Pemuda. Olahraga

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan arsip yang efektif dan efisien berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip yang merupakan pelaksanaan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
4. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
5. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
7. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
8. Biasa adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
9. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
10. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.

11. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.

#### Pasal 2

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis merupakan pengamanan dan pemberian akses terhadap Arsip Dinamis Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### Pasal 3

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis terdiri atas:

- a. Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Fasilitatif; dan
- b. Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Substantif.

#### Pasal 4

Klasifikasi Keamanan dan akses arsip fasilitatif dan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

- a. Klasifikasi Arsip;
- b. Jenis Arsip;
- c. Klasifikasi Keamanan;
- d. Hak Akses;
- e. Akses Publik;
- f. Dasar Pertimbangan; dan
- g. Unit Pengolah.

#### Pasal 5

- (1) Klasifikasi keamanan arsip dinamis terdiri atas:
  - a. Biasa;
  - b. Terbatas; dan
  - c. Rahasia.



(2) Klasifikasi Akses Arsip Dinamis terdiri dari:

- a. terbuka; dan
- b. tertutup.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP  
 DINAMIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. FASILITATIF

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	PR	PERENCANAAN					Bagian Program dan Anggaran
1.	PR.00 PR.00.00	Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PR.00.01	b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Master Plan (RPJP)					
	PR.00.02	c. Rencana Strategis (RENSTRA)					
2.	PR.01	Program Kerja Tahunan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	PR.01.00	a. Program Kerja Tahunan Unit Kerja					
	PR.01.01	b. Program Kerja Tahunan Kementerian Pemuda dan Olahraga					
3.	PR.02	Penetapan/ Kontrak Kinerja	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	PR.02.00	a. Menteri Pemuda dan Olahraga					
	PR.02.01	b. Pimpinan Unit Kerja					
	PR.02.02	c. Staf/Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4.	PR.03 PR.03.00	Penyusunan Rencana Anggaran Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga 1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2) Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) 3) Petunjuk Operasional (PO) 4) Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) 5) Pendapatan Negara Bukan Pajak/PNBP 6) Standar Biaya Khusus/ SBK	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	PR.03.01	a. Revisi Dokumen Anggaran 1) Revisi DIPA 2) Revisi PO 3) Anggaran Biaya Tambahan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5.	PR.04 PR.04.00 PR.04.01	4) APBN Perubahan  Laporan a. Laporan Insidental b. Laporan Berkala 1) Laporan Bulanan Unit Kerja 2) Laporan Triwulan Unit Kerja 3) Laporan Semesteran Unit Kerja 4) Laporan Tahunan Unit Kerja 5) Laporan Tahunan Kementerian Pemuda dan Olahraga c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1) LAKIP Unit Kerja 2) LAKIP Kementerian Pemuda dan Olahraga	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
6.	PR.05 PR.05.00	Evaluasi Program a. Evaluasi program unit kerja	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PR.05.01	b. Evaluasi program Kementerian Pemuda dan Olahraga				Tugas dan Fungsi Negara	
II	KP	KEPEGAWAIAN					Bagian SDM Aparatur
1.	KP.00 KP.00.00  KP.00.01  KP.00.02 KP.00.03	Formasi ASN a. Usulan formasi disertai dengan: 1) Analisa Jabatan 2) Beban Kerja b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan/Penetapan Formasi d. Penetapan Formasi Khusus	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
2.	KP.01 KP.01.00	Pengadaan Pegawai a. Penerimaan ASN 1) Pengumuman 2) Lamaran 3) Pemanggilan 4) Test 5) Pengumuman Penerimaan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.01.01 KP.01.02 KP.01.03 KP.01.04	6) Berkas Lamaran yang Tidak Diterima  b. Pengangkatan CASN dan ASN c. Prajabatan d. Penempatan e. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)					
3.	KP.02 KP.02.00 KP.02.01 KP.02.02 KP.02.03  KP.02.04 KP.02.05 KP.02.06  KP.02.07	Mutasi a. Kenaikan Pangkat/Golongan b. Kenaikan Gaji Berkala c. Penyesuaian Masa kerja d. Penyesuaian Tunjangan Keluarga e. Penyesuaian Kelas Jabatan f. Rotasi Kerja g. Alih Tugas	Terbatas	Eselon II / Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.02.08	h. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar /Status/Kedudukan Hukum Pegawai i. Baperjakat					
4.	KP.03 KP.03.00	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan a. Pengangkatan Jabatan b. Pemberhentian Jabatan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KP.03.01		Terbatas	Eselon II / Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
5.	KP.04 KP.04.00 KP.04.01	Pendelegasian Wewenang a. Pelaksana Tugas (Plt) b. Pelaksana Harian (Plh)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
6.	KP.05	Administrasi Pegawai	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.05.00	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas				Tugas dan Fungsi Negara	
	KP.05.01	b. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan					
	KP.05.02	c. Cuti Alasan Penting					
	KP.05.03	d. Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara					
	KP.05.04	e. Dokumentasi Identitas Pegawai 1) Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan 3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) 4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.05.05	f. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KP.05.06	g. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
7.	KP.06 KP.06.00	Berkas Perseorangan a. Berkas Perseorangan Menteri Pemuda dan olahraga	Rahasia	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Menyebabkan Terganggunya <i>Privacy</i> dan Kinerja Lembaga	
	KP.06.01	b. Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil • Berkas lamaran yang diterima	Rahasia	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Menyebabkan Terganggunya <i>Privacy</i> dan Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya</li> <li>• Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN</li> <li>• S.K. Pengangkatan CPNS</li> <li>• Hasil Pengujian Kesehatan</li> <li>• S.K. Pengangkatan PNS</li> <li>• S.K. Peninjauan Masa Kerja</li> <li>• S.K. Kenaikan Pangkat</li> <li>• Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan</li> <li>• S.K. Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional</li> </ul>					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• S.K.Perpindahan Wilayah Kerja</li> <li>• S.K. Perpindahan Antar Instansi</li> <li>• S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)</li> <li>• Berita Acara Pemeriksaan</li> <li>• S.K.Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS</li> <li>• S.K.Perbantuan/Dipekerjaka n di Luar Instansi Induk</li> <li>• S.K.Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan</li> <li>• S.K.Pemberian Uang Tunggu</li> <li>• S.K.Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara</li> </ul>					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK. Pengalihan PNS</li> <li>• S.K.Pemberhentian sebagai PNS</li> <li>• S.K.Pemberhentian Sementara</li> <li>• Surat Keterangan Pernyataan Hilang</li> <li>• Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang</li> <li>• S.K.Penggantian Nama</li> <li>• Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran</li> <li>• Akta Nikah/Cerai</li> <li>• Akta Kelahiran</li> <li>• Isian Formulir PUPNS</li> <li>• Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan</li> </ul>					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol</li> <li>• Surat Keterangan Mutasi Keluarga</li> <li>• Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang</li> <li>• Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan</li> <li>• Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional</li> <li>• Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus</li> <li>• Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala</li> <li>• Surat Tugas/izin Belajar Dalam/Luar Negeri</li> <li>• Surat izin Bepergian ke Luar Negeri</li> </ul>					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS</li> <li>• Ijasah / Sertifikat</li> <li>• S.K.Penempatan / Penarikan Pegawai</li> <li>• S.K.Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk</li> <li>• Surat Pertimbangan Status PNS</li> <li>• S.K.Pengaktifan Kembali Sebagai PNS</li> <li>• Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala / Wakil Kepala Daerah.</li> <li>• SK Pensiun</li> </ul>					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.06.02	c. Berkas perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Rahasia	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Menyebabkan Terganggunya <i>Privacy</i> dan Kinerja Lembaga	
8	KP.07 KP.07.00	Pengembangan Karir a. Pendidikan dan Pelatihan/Kursus Pegawai 1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 2) Pelaksanaan 3) Pelaporan 4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.07.01	b. Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan 1) Ujian Penyesuaian ijazah 2) Ujian DInas	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
9	KP.08 KP.08.00 KP.08.01	Penilaian Kompetensi a. Berkas Penilaian Kompetensi b. Hasil Penilaian Kompetensi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
10	KP.09 KP.09.00	Pembinaan Pegawai a. Standar Kinerja Pegawai (SKP)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KP.09.01	b. Angka Kredit 1) Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 2) Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KP.09.02	c. Disiplin 1) Penegakan Disiplin	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		2) Peningkatan Disiplin				Tugas dan Fungsi Negara	
	KP.09.03	d. Kode Etik Pegawai	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
11	KP.10 KP.10.00  KP.10.01	Status dan Kedudukan Pegawai a. Pertimbangan status kepegawaian 1) Analisis status kepegawaian 2) Penyusunan pertimbangan status kepegawaian b. Pertimbangan kedudukan kepegawaian 1) Analisis kedudukan kepegawaian 2) Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.10.02	c. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai					
	KP.10.03	d. Perselisihan/sengketa kepegawaian					
12	KP.11 KP.11.00	Sistem Informasi Kepegawaian a. Pengolahan data dan informasi kepegawaian 1) Pengolahan Data a) Pengelolaan database kepegawaian ASN b) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN 2) Informasi kepegawaian a) Penyajian informasi dan penyusunan tabel	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		referensi kepegawaian ASN b) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN c) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik					
	KP.11.01	b. Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KP.11.02	c. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian 1) Arsip kepegawaian elektronik a) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian	Terbatas	Eselon III/ Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b) Perakaman dan arsip kepegawaian c) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik 2) Arsip Kepegawaian Fisik					
13	KP.12 KP.12.00 KP.12.01 KP.12.02 KP.12.03 KP.12.04 KP.12.05	Kesejahteraan Pegawai a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan b. Pegawai c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.12.06	f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas					
	KP.12.07	g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih					
	KP.12.08	h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi					
	KP.12.09	j. Berkas tentang Medical Record	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
14	KP.13 KP.13.00 KP.13.01 KP.13.02	Pemberhentian Pegawai a. Dengan Hormat b. Tidak Dengan Hormat c. Pemberhentian Sementara	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
15	KP.14 KP.14.01  KP.14.02 KP.14.03  KP.14.04	Pensiun a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara 1) Administrasi pensiun ASN 2) Perekaman dan pemeliharaan data pensiun b. Penetapan Pensiun ASN c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN d. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya 1) Administrasi pensiun Pejabat Negara 2) Penyiapan pensiun pejabat negara 3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
III	KU	KEUANGAN					Bagian Keuangan

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1.	KU.00 KU.00.00	Pelaksanaan Anggaran a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) Draf DIPA 4) Draf POK 5) DIPA 6) POK	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KU.00.01	b. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) Draf RAB 4) RAB					



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2.	KU.01 KU.01.00	Pengeluaran Anggaran a. Tunjangan kinerja 1) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) 2) Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja 3) Daftar nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja 4) Daftar Pembayaran 5) Berkas Setoran Bank	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	KU.01.01	b. Pengeluaran Anggaran Pelaksana Kegiatan 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang)) 2) SPP-UP (Uang Persediaan) 3) SPP-TUP (Tambah Uang Persediaan)	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		4) Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM) 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 6) Juklak/mekanisme pengelolaan APBN 7) Bahan Nota Keuangan					
	KU.01.02	c. Penggajian 1) Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium 2) Kartu Gaji	Terbatas	Eselon III/Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	KU.01.03	d. KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai)	Terbatas	Eselon III/Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
3.	KU.02 KU.02.00	Pengelolaan Perbendaharaan a. Perbendaharaan	Biasa	Eselon IV/Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		1) Usulan Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan				Tugas dan Fungsi Negara	
		2) SK Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
		3) SK Pengangkatan KPA, BP (Bendahara Pengeluaran	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						Tugas dan Fungsi Negara	
		4) SPP (Surat Permintaan Pembayaran)	Terbatas	Eselon III/ Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
		5) Surat Perintah Membayar (SPM)	Terbatas	Eselon III/ Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
		6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
		7) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ)	Terbatas	Eselon III/ Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.02.01	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1) Laporan PNB	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KU.02.02	c. Kartu Pengawasan Kredit	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KU.02.03	d. Pajak 1) Surat Setoran Pajak SPT	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KU.02.04	e. Penerimaan Non Pajak 1) SSBP 2) SSPB	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	KU.02.05	f. Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.02.06	g. Verifikasi Anggaran 1) SPJ yang sudah absah dan benar	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dampak Terhadap Kinerja Lembaga  Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	KU.02.07	h. Pembukuan Rekening 1) Surat Persetujuan Pembukaan Rekening 2) Daftar Buku Rekening Perguruan Tinggi Rekonsialisasi Rekening dengan Kementerian Keuangan	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	KU.02.08	i. Pembukuan Anggaran 1) Buku Kas Umum 2) Buku Kas Pembantu 3) Kartu Realisasi Anggaran	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Kartu Pengawasan Realisasi Anggaran					
	KU.02.09	j. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1) Laporan Kehilangan 2) Berita Acara Kehilangan 3) Berita Acara Sidang Majelis TGR 4) SK tanggung jawab mutlak 5) SK Penghapusan 6) Laporan Penyelesaian Laporan Pemantauan dari BPK	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	KU.02.09	k. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) 1) Laporan Penyelesaian 2) Laporan Pemantauan dari BPK	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.02.09	1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/ ITJEN/ BPKP 1) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2) Laporan Hasil Pemeriksaan ITJEN Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
4	KU.03 KU.03.00	Administrasi Keuangan a. Keterangan Penghasilan	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	KU.03.01	b. Permohonan Pinjaman	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.03.02	c. Iuran Keanggotaan Organisasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
	KU.03.03	d. Speciment Tanda Tangan KPA, BP, PPK, dan BPP	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
5	KU.04 KU.04.00	Belanja a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya: 1) Barang Pakai Habis 2) Barang Inventaris:	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		a) Barang Bergerak/Barang Inventari b) Tanah dan bangunan 3) Jasa 4) Software Komputer Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain: a) Pengumuman Lelang b) Dokumen Prakuualifikasi c) Dokumen Peninjauan Lapangan d) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan e) Berita Acara Pelelangan f) Usulan Calon Pemenang g) Surat Perintah Kerja (SPK) h) Kontrak/Adendum Kontrak					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.04.01	b. Belanja Modal	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KU.04.02	c. Belanja Operasional lainnya	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
6	KU.05	Bantuan Luar Negeri a. Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) b. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book)	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
		d. Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerimaan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
		e. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri Aplikasi Penarikan Dana	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
		f. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya: (Reimbursement pinjaman berakhir, Direct Payment/Transfer Procedure,	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Special Commitment/ L/C Opening, Special Account/Imprest Fund, Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri, Notice Of Disbursement)					
		g. Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
		h. Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		i. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain No. Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure(SE) Staff Appraisal Report	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
		j. Staff Appraisal Report	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
		k. Report /Laporan yang terdiri dari: 1) Progress Report 2) Monthly Report 3) Quarterly Report	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		4) Final Report/Completion Report					
		1. Laporan Hutang Negara : 1) Laporan Pembayaran Hutang Negara 2) Laporan Posisi Hutang Negara	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
		m. Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
7	KU.06 KU.06.00 KU.06.01 KU.06.02 KU.06.03	Layanan Keuangan a. Administrasi perbendaharaan dan penggajian b. Verifikasi anggaran c. Koordinasi keuangan (Rekonsialisasi) d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
8	KU.06.04 KU.07 KU.07.00	e. Sosialisasi keuangan Akuntansi dan Pelaporan a. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 1) Buku Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 2) Kebijakan Akuntansi (SK Sekjen/ Permen) 3) Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (Database) 4) Laporan Realisasi Semesteran APBN	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	KU.07.01	b. Perhitungan anggaran 1) RKAKL 2) RAB 3) TOR	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KU.07.02	c. Laporan Keuangan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		1) Laporan Keuangan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) a) Laporan Realisasi Anggaran b) Laporan Operasional c) Laporan Perubahan Ekuitas d) Laporan Pendapatan e) Laporan Barang Milik Negara f) Laporan Persediaan g) Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN h) Berita Acara Rekonsiliasi Internal i) Berita Acara Stock opname				Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		j) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara k) Berita ACara Pemeriksaan Kas l) Laporan Realisasi Belanja m) Laporan Pengembalian Belanja n) Catatan Atas Laporan Keuangan o) Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara p) Berita Acara Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL 2) Laporan Keuangan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) a) Laporan Realisasi Anggaran					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b) Laporan Operasional c) Laporan Perubahan Ekuitas d) Laporan Pendapatan e) Laporan Barang Milik Negara f) Laporan Persediaan g) Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN h) Berita Acara Rekonsiliasi Internal i) Berita Acara Stock opname j) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara k) Berita Acara Pemeriksaan Kas l) Laporan Realisasi Belanja					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		m) Laporan Pengembalian Belanja n) Catatan Atas Laporan Keuangan o) Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara 3) Laporan Neraca					
	KU.07.03	d. Evaluasi laporan keuangan 1) Laporan evaluasi Satuan Kerja	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	KU.07.04	e. Pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan 1) Dokumen Akuntansi Keuangan: a) Berita Acara Pemeriksaan Kas b) Kas/Register Penutupan Kas	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
IV	HK	c) Arsip Data Komputer (ADK) d) Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN e) Laporan					Bagian Hukum
1	HK.00	Program Legislasi	Biasa	Eselon IV / Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	HK.01	<p>Produk Hukum</p> <p>a. Undang-undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan</p> <p>c. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (mulai dari rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum)</p> <p>d. Keputusan (mulai dari rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum)</p>	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		e. Instruksi (mulai dari rancangan awal sampai rancangan akhir dan telaah hukum) f. Surat Edaran					
3	HK.02	Standar/ pedoman/ prosedur kerja/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis yang bersifat nasional/ regional/ instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
4	HK.03 HK.03.00 HK.03.01	Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding / Kontrak / Perjanjian Kerjasama a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
5	HK.04	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	HK.05 HK.05.00 HK.05.01 HK.05.02  HK.05.03 HK.05.04 HK.05.05	Kasus Hukum a. Perkara Perdata b. Perkara Pidana/Pendampingan c. Perkara Tata Usaha Negara/TUN d. Perkara Arbitrase e. Perkara Pengadilan Khusus f. Sengketa Adat	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
7	HK.06	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Kesadaran Hukum	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
8	HK.07 HK.07.00 HK.07.01	Hak Asasi Kekayaan Intelektual a. Hak Cipta b. Hak Paten	Rahasia	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Menyebabkan Terganggunya <i>Privacy</i> dan Kinerja Lembaga	
9	HK.08	Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		a. Dalam Negeri b. Luar Negeri				Tugas dan Fungsi Negara	
V	OT	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN					Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1	OT.00 OT.00.00	Organisasi a. Struktur, tugas dan fungsi organisasi 1) Pembentukan 2) Pengubahan 3) Pembubaran b. Evaluasi organisasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
2	OT.01 OT.01.00 OT.01.01 OT.01.02	Analisis Jabatan a. Analisis Jabatan Struktural b. Analisis Jabatan Fungsional Tertentu c. Analisis Jabatan Fungsional Umum	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	OT.02	Analisis Beban Kerja (ABK)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
4	OT.03 OT.03.00 OT.03.01	Standar Kompetensi Jabatan a. Standar Kompetensi Jabatan Struktural b. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
5	OT.04 OT.04.00 OT.04.01	Ketatalaksanaan a. Penetapan/Penyelarasan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1) Usulan SOP Unit 2) Pembahasan SOP 3) Pengesahan SOP 4) Evaluasi atas implementasi SOP b. Tata Hubungan Kerja	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	OT.05	Reformasi Birokrasi  1) Tata hubungan kerja antar struktural 2) Tata hubungan kerja antar fungsional 3) Tata hubungan kerja antar struktural dan fungsional	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
VI	HM	HUBUNGAN MASYARAKAT					Bagian Humas
	HM.00 HM.00.00	Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat a. DPR/DPD/MPR 1) Rapat Dengar Pendapat/Hearing DPR 2) Rapat pimpinan dengan DPR/DPD/MPR	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	HM.00.01	b. Lembaga Negara	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
	HM.00.02	c. Organisasi Nasional dan Internasional	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
	HM.00.03	d. Perusahaan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
						Tugas dan Fungsi Negara	
	HM.00.04	e. Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	HM.00.05	f. Perguruan Tinggi/Sekolah	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	HM.00.06	g. Hubungan dengan media massa: 1) Siaran pers/ konferensi pers/ press release/wawancara 2) Kunjungan wartawan/peliputan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
	HM.00.07	h. Bakohumas	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	HM.01	Pemenuhan Informasi Publik/PPID	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tugas dan Fungsi Negara  Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
3	HM.02	Penerbitan Penerbitan Bulletin/majalah/jurnal/ naskah sumber, mulai dari perencanaan sampai penyebaran	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
4	HM.03	Dokumentasi/ liputan Kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/ foto/ video/ rekaman suara/ multimedia a. Menteri Pemuda dan Olahraga b. Eselon I c. Pejabat lain/ pegawai	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	HM.04	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan: a. Kliping koran b. Brosur/ leaflet/ poster/ plakat c. Pengumuman/ pemberitaan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
VII	TU	KETATAUSAHAAN					Bagian Tata Usaha
1	TU.00 TU.00.00	Administrasi Menteri/Pimpinan a. Sambutan/Pidato Menteri/Pejabat 1) Menteri 2) Pejabat Eselon I b. Ucapan 1) Ucapan Selamat 2) Ucapan Terimakasih 3) Ucapan Bela Sungkawa	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	TU.00.01		Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
2	TU.01 TU.01.00	Keprotokolan a. Upacara Bendera	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	TU.01.01 TU.01.02	1) Upacara Hari Besar 2) Upacara Pelantikan 3) Upacara Serah Terima Jabatan b. Buku Tamu c. Agenda Pimpinan 1) Perencanaan 2) Penjadwalan 3) Pelaksanaan Agenda Pimpinan				Tugas dan Fungsi Negara	
3	TU.02	Penghargaan/ Tanda Kenang-kenangan a. Instansi/Organisasi b. Perseorangan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
4	TU.03	Penggandaan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
VIII	KA	KEARSIPAN					Bagian Tata Usaha
1	KA.00 KA.00.00  KA.00.01	Administrasi Persuratan a. 'Pengurusan Surat Masuk 1) Buku Agenda Surat Masuk 2) Buku Ekspedisi Surat Masuk b. 'Pengurusan Surat Keluar 1) Bukti Tanda Terima Surat 2) Buku Ekspedisi Surat Keluar 3) Buku Agenda Surat Keluar	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
2	KA.01 KA.01.00 KA.01.01 KA.01.02 KA.01.03  KA.01.04	Penyusunan dan Penerapan Sistem Kearsipan Dinamis a. Tata Naskah Dinas b. Klasifikasi Arsip c. Jadwal Retensi Arsip d. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip e. Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan lainnya	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	KA.02 KA.02.00 KA.02.01 KA.02.02 KA.02.03 KA.02.04	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip a. Daftar arsip b. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi) c. Daftar pencarian arsip d. Daftar Arsip Informasi Publik e. Daftar Arsip Vital/ Aset	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
4	KA.03	Layanan arsip (peminjaman, penggunaan arsip)	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
5	KA.04 KA.04.00	Penyusutan arsip a. Pemindahan arsip inaktif 1) Berita acara pemindahan 2) Daftar arsip yang dipindahkan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KA.04.01	<p>b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan Panitia Penilai</li> <li>2) Penilaian Panitia Penilai</li> <li>3) Rekomendasi/ pertimbangan/ pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia</li> <li>4) Penetapan arsip yang dimusnahkan</li> <li>5) Daftar arsip yang dimusnahkan</li> <li>6) Berita acara pemusnahan</li> </ol>	Terbatas	Eselon III/ Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	KA.04.02	<p>c. Penyerahan arsip statis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembentukan panitia penilai</li> <li>2) Notulen rapat panitia</li> <li>3) Surat pertimbangan panitia penilai</li> </ol>	Terbatas	Eselon III/ Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		4) Verifikasi dan surat persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia 5) Penetapan arsip yang akan diserahkan 6) Daftar Arsip yang akan diserahkan 7) Berita acara serah terima arsip 8) Daftar arsip yang diserahkan					
IX	PU	PERPUSTAKAAN					Bagian Humas
1	PU.00 PU.00.00 PU.00.01	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka a. Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka Deposit b. Administrasi pengelolaan Deposit Bahan Pustaka	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	PU.01 PU.01.00 PU.01.01	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka a. Buku induk koleksi b. Daftar buku terseleksi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
X	TI	TEKNOLOGI INFORMASI					Bagian Sistem Informasi
1	TI.00	Rencana Strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
2	TI.01 TI.01.00 TI.01.01	Kebijakan Teknologi Informasi a. Kebijakan Aplikasi b. Kebijakan Infrastruktur	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
3	TI.02 TI.02.00 TI.02.01 TI.02.02 TI.02.03	Aplikasi Berbasis Elektronik a. Pembangunan Aplikasi b. Pengembangan Aplikasi c. Pemeliharaan Aplikasi d. Manual Penggunaan Aplikasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	TI.03 TI.03.00  TI.03.01 TI.03.02	Pengelolaan Data/Informasi a. Pengumpulan Data 1) perencanaan kebutuhan data 2) permintaan kepada pemilik data 3) penerimaan data b. Penyusunan Basis Data c. Penyajian Informasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
5	TI.04 TI.04.00	Infrastruktur a. <i>Data Center</i>	Terbatas	Eselon III/ Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	TI.04.01	b. <i>Hardware</i>	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	TI.04.02	c. <i>Software</i>	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
	TI.04.03	d. <i>Networking</i>	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
6	TI.05 TI.05.00	Keamanan Data a. Backup Data	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	TI.05.01	b. Anti Virus	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Negara	
	TI.05.02	c. Firewall	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7	TI.06	Dokumen hosting: a. Formulir permintaan hosting b. Laporan hasil uji kelayakan c. Laporan pelaksanaan hosting	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
8	TI.07	Evaluasi Sistem dan Media	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
XI	PW	PENGAWASAN					Inspektorat
1	PW.00	Audit a. Audit operasional b. Audit kinerja c. Audit BMN d. Audit dengan tujuan tertentu	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	PW.01	e. Audit lainnya Reviu a. Reviu Rencana Anggaran b. Reviu Revisi Anggaran c. Reviu Laporan Keuangan d. Reviu Laporan Kinerja e. Reviu lainnya	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
3	PW.02	Evaluasi a. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) b. Evaluasi Reformasi Birokrasi c. Evaluasi kegiatan lainnya	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
4	PW.03	Pengaduan Masyarakat a. Internal b. Eksternal	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	PW.04	Pengawasan Melekat a. Proses pemeriksaan pengawasan b. Berita acara pemeriksaan c. Pakta Integritas	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
6	PW.05	Laporan Hasil Pengawasan a. Laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pemuda dan Olahraga b. Tanggapan atas laporan pemeriksaan BPK RI	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
7	PW.06 PW.06.00	Pemantauan a. Pemantauan pelaksanaan kegiatan/program Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dan per- cepatan penyerapan anggaran	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.06.01 PW.06.02 PW.06.03 PW.06.04	<p>dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan</p> <p>b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)</p> <p>c. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)</p> <p>d. Penerapan <i>Early Warning System</i></p> <p>e. Pemantauan Disiplin Pegawai</p>					
8	PW.07	Kegiatan pengawasan lainnya	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
XII	PL	PERLENGKAPAN					Bagian Perlengkapan
1	PL.00 PL.00.00 PL.00.01 PL.00.02	Perencanaan Pengadaan a. Analisa Kebutuhan b. Tata Ruang c. Daftar Rekanan Mampu 1) Perkenalan menjadi rekanan 2) Penawaran menjadi rekanan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
2	PL.01 PL.01.00 PL.01.01 PL.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa a. Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung) b. Pengadaan barang melalui lelang c. Pengadaan jasa	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
3	PL.02 PL.02.00	Pengelolaan Barang Milik Negara a. Penyimpanan BMN 1) Penerimaan (Surat Bukti Barang masuk)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		2) Penyimpanan barang 3) Pengeluaran barang dari gudang (Surat Bukti pengeluaran barang) b. Distribusi Penyaluran BMN 1) Distribusi barang intern 2) Distribusi barang ekstern c. Inventarisasi BMN 1) Keputusan pembentukan tim 2) Rencana kerja pelaksanaan inventarisasi 3) Kertas kerja inventarisasi 4) Berita acara inventarisasi 5) Daftar inventaris /Buku barang/Daftar barang lainnya 6) Laporan hasil inventarisasi d. Penghapusan BMN					
	PL.02.01						
	PL.02.02						
	PL.02.03						

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PL.02.04 PL.02.05	(Pelaksanaan penghapusan BMN) 1) Keputusan pembentukan tim 2) Berita Acara Penghapusan BMN 3) Daftar barang yang dihapus 4) Laporan hasil pelaksanaan penghapusan BMN termasuk didalamnya proses lelang penghapusan e. Hibah f. Pelaporan BMN 1) Laporan kondisi barang 2) Laporan barang kuasa pengguna 3) Berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal 4) Laporan persediaan habis pakai					

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	PL.03	5) Laporan persediaan tidak habis pakai 6) Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara					
		Dokumen kepemilikan aset/ kekayaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (sertifikat tanah, IMB, BPKB, STNK, <i>Blueprint</i> dan Lain-lain)	Terbatas	Eselon II/ Pimpinan Tinggi Pratama	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	Bagian Rumah Tangga
XIII	RT	KERUMAHTANGGAAN					
1	RT.00	Perjalanan dinas luar negeri a. Pengurusan Paspor b. Visa c. Tiket Pesawat	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
2	RT.01	Fasilitas a. Kendaraan Dinas	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	

NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	RT.02	b. Ruang Rapat/Konsumsi c. Telekomunikasi  Pemeliharaan a. Pelaporan kerusakan b. Perawatan bangunan kantor c. Perawatan rumah jabatan menteri d. Perawatan inventaris kantor e. Pemeliharaan alat telekomunikasi f. Perbaikan/ service kendaraan dinas g. Kebersihan taman dan lingkungan kantor	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tugas dan Fungsi Negara  Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	
4	RT.03 RT.03.00	Keamanan dan Ketertiban a. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas:	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Negara	



NO	KLASIFIKASI ARSIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RT.03.01	1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga/ daftar piket 3) Catatan gangguan/ pelanggaran/ kejadian 4) Surat izin keluar masuk orang atau barang b. Laporan ketertiban dan keamanan 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan					

## B. SUBSTANTIF

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	DP	PEMBERDAYAAN PEMUDA					Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
1	DP.00 DP.00.00 DP.00.01	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda a. Pengkajian Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 1) Pengkajian Tenaga Pemuda 2) Pengkajian Sumber Daya Pemuda b. Tenaga Kepemudaan Formal dan Nonformal	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	DP.00.02	1) Bantuan Pendidikan Formal Beasiswa S-2 Pemuda Berprestasi 2) Bantuan Kepemudaan Non formal c. Tenaga Kepemudaan Layanan Khusus Fasilitasi layanan khusus dalam peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi a) Proposal Permohonan Bantuan b) Verifikasi c) Berita acara verifikasi d) SK penetapan penerima Bantuan e) Perjanjian Kerjasama f) Daftar Penerima Bantuan					

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	DP.01 DP.01.00	Peningkatan Wawasan Pemuda a. Wawasan Politik, Pertahanan dan Keamanan 1) Program a) Pelatihan peningkatan wawasan politik b) Pelatihan peningkatan wawasan pertahanan c) Pelatihan peningkatan wawasan keamanan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
	DP.01.01	b. Wawasan Lingkungan Strategis dan Pencegahan Bahaya Destruktif Pemuda Kader yang difasilitasi dalam Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba a) Kader Pemuda Anti Narkoba	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b) Pelatihan Calon Kader Pemuda Anti Narkoba c) Sosialisasi dan Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kader Pemuda Anti Narkoba					
	DP.01.02	c. Wawasan Sosial, Budaya dan Hukum 1) Jambore Pemuda Indonesia 2) Program Wawasan Sosial, Budaya dan Hukum	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
3	DP.02 DP.02.00	Peningkatan Kapasitas Pemuda a. Pariwisata dan Kemaritiman 1) Kapal Pemuda ASEAN-Jepang / SSEAYP a) rekomendasi dari dispora provinsi b) SK penetapan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c) laporan. 2) Kapal Pemuda Nusantara 3) Pelatihan Kader Pemuda Maritim b. Industri dan Kemandirian Ekonomi Contoh : Pelatihan Pemuda Bidang Industri Manufaktur c. Kedauletan Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup 1) Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih 2) Pemagangan Pemuda di Luar Negeri					
	DP.02.01						
	DP.02.02						
4	DP.03 DP.03.00	Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda a. Pemetaan dan Penelusuran IPTEK Fasilitasi Pemetaan dan Penelusuran IPTEK	Terbatas	Eselon III/ Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	DP.03.01	b. Pemanfaatan IPTEK Peningkatan Teknopreneur Muda Pemula	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
	DP.03.02	c. Penghayatan dan Pengamalan IMTAK 1) Konferensi Internasional Perempuan Muslim 2) Konferensi Internasional Pemuda Budhist 3) Pemuda Anti Tawuran	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
5	DP.04 DP.04.00	Peningkatan Kreativitas Pemuda a. Kreativitas Grafika dan Kriya	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	DP.04.01	Fasilitasi Program Kreativitas Grafika dan Kriya b. Kreativitas Fashion dan Film Fasilitasi Program Kreativitas Fashion dan Film				Tugas dan Fungsi Lembaga	
	DP.04.02	c. Kreativitas Teknologi Informasi Fasilitasi Program Kreativitas Teknologi Informasi					
	DP.04.03	d. Kreativitas Musik dan Kuliner Fasilitasi Program Musik dan kuliner					
	DP.04.04	e. Kirab Pemuda Nusantara					
6	DP.05	Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional • Pengelolaan Prasarana dan Sarana Teknis Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kepemudaan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7	DP.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kepemudaan</li> <li>• Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Keolahragaan.</li> </ul> Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
II	PP	PENGEMBANGAN PEMUDA					Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
1	PP.00 PP.00.00	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda a. Kaderisasi dan Pendayagunaan Kepemimpinan 1) Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		2) Pelatihan Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda Tingkat Utama 3) Penguatan Kader Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 4) Pendidikan Paskibraka (Penyelenggaraan Pelatihan Paskibraka Nasional) 5) Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional b. Kepeloporan Tanggap Bencana Dan Rawan Sosial 1) Rekrutmen Pemuda Relawan tingkat propinsi 2) Pelatihan Pemuda Peduli Rawan Sosial 3) Pelatihan Pemuda Peduli Tanggap Bencana					
	PP.00.01						
	PP.00.02						

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Kepeloporan Desa dan Daerah Khusus Pemuda Mandiri Membangun Desa a) Pengelolaan Pokja dan Database Pemuda Mandiri Membangun Desa b) Sosialisasi Program Pemuda Mandiri Membangun Desa c) Seleksi Pemuda Mandiri Membangun Desa d) Pembekalan dan Penempatan Pemuda Mandiri Membangun Desa e) Bantuan Rintisan Pemuda Mandiri Membangun Desa f) Bantuan Operasional Bulanan Kader					

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	PP.01 PP.01.00	g) Pendampingan Program Pemuda Mandiri Membangun Desa Kewirausahaan Pemuda a. Penelusuran dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Pemuda 1) Penelusuran Potensi Kewirausahaan Pemuda 2) Pemetaan Potensi Kewirausahaan Pemuda b. Pendampingan dan Pengembangan Potensi 1) Pendampingan 2) Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda c. Akses Permodalan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
	PP.01.01 PP.01.02						

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		1) Fasilitas Sentra Kewirausahaan Pemuda 2) Wirausaha Muda yang memperoleh Fasilitas akses permodalan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) 3) Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) yang dibentuk di pusat, provinsi, kabupaten/kota 4) Fasilitas terhadap wirausaha muda potensial					
3	PP.02 PP.02.00 PP.02.01	Organisasi Kepemudaan Dan Kepramukaan a. Organisasi Kepelelajaran Pengembangan Kelembagaan Organisasi Kepelelajaran b. Organisasi Kemahasiswaan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PP.02.02	Pengembangan Kelembagaan Organisasi Kemahasiswaan c. Organisasi Kepemudaan 1) Program Pengembangan Kelembagaan Organisasi Kepemudaan 2) Fasilitasi pelatihan manajemen organisasi kepemudaan 3) Fasilitasi Kepemudaan dan Kemah Pengurus Kepemudaan d. Pembinaan Gerakan Pramuka 1) Fasilitasi pemuda dalam pendidikan kepramukaan 2) Fasilitasi Pengembangan organisasi Kepramukaan (kwarnas/kwarda/kwarcab)					
4	PP.03 PP.03.00	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PP.03.01	a. Standardisasi Organisasi dan Sarana Kepemudaan 1) Standardisasi untuk Organisasi Kepemudaan 2) Sosialisasi Bantuan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 3) Pengadaan Prasarana Bank Musik 4) Bimbingan Teknis Bantuan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 5) Pemilihan Kota Layak Pemuda b. Prasarana dan Sarana Indonesia Timur 1) Pengadaan Prasarana Kepemudaan di Indonesia Timur				Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PP.03.02	2) Pengadaan Sarana Kepemudaan di Indonesia Timur 3) Monitoring dan Evaluas c. Prasarana dan Sarana Indonesia Tengah 1) Pengadaan Prasarana Kepemudaan di Indonesia Tengah 2) Pengadaan Sarana Kepemudaan di Indonesia Tengah d. Prasarana dan Sarana Indonesia Barat 1) Pengadaan Prasarana Kepemudaan di Indonesia Barat					
	PP.03.03						



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		2) Pengadaan Sarana Kepemudaan di Indonesia Barat					
5	PP.04 PP.04.00	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda a. Kemitraan Dalam Negeri 1) Fasilitasi Kemitraan Pusat dan Daerah 2) Fasilitasi Kemitraan Lintas Sektoral dan Swasta	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	PP.04.01	b. Kemitraan Luar Negeri 1) Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara 2) Fasilitasi Rintisan dan Pengembangan Kemitraan Kepemudaan	Terbatas	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PP.04.02	c. Promosi dan Penghargaan Pemuda <ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Promosi kepemudaan Fasilitasi Penerima penghargaan kepemudaan</li> </ul>	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
6	PP.05	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
III	BO	PEMBUDAYAAN OLAHRAGA					Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
1	BO.00 BO.00.01	Pengelolaan Olahraga Pendidikan a. Olahraga Pendidikan Dasar 1) Rapat Koordinasi Stakeholder Pengembangan Olahraga Pendidikan Dasar 2) Pelatihan Instruktur / Pelatih Dasar 3) <i>Event</i> Olahraga Pendidikan Dasar a) Festival Sepak Bola U – 12 b) Voucher Pembinaan Olahraga Pendidikan c) Liga Pelajar U-14 b. Olahraga Pendidikan Menengah	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
	BO.00.02						

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		1) Rapat Koordinasi Stakeholder Pengembangan Olahraga Pendidikan Menengah 2) Pengiriman Tim pada Kejuaraan Olahraga Multievent Internasional 3) Event Olahraga Pendidikan Menengah a) Gerakan Ayo Olahraga Melalui Senam Bugar Pelajar Indonesia b) Liga Pelajar U-16 4) Pekan Olahraga Pendidikan di Perbatasan 5) Penyelenggaraan Gala Desa Olahraga Pendidikan Tinggi c. Rapat Koordinasi Stakeholder Pengembangan Olahraga Pendidikan Tinggi					
	BO.00.03						

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	BO.01 BO.01.00	2) <i>Event</i> Olahraga Pendidikan Tinggi (Liga Mahasiswa U-21) Pengelolaan Olahraga Rekreasi a. Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga 1) Rapat Koordinasi Pengelolaan Olahraga Rekreasi 2) Fasilitas Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga b. Pengembangan Sanggar dan Pusat Kebugaran 1) Rapat Koordinasi Pengelolaan Olahraga Rekreasi 2) Fasilitas pengembangan sanggar dan pusat kebugaran 3) Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	BO.01.02	<p>4) Festival Senam Kebugaran Jasmani</p> <p>5) Senam Poco-Poco Nusantara</p> <p>c. Pengelolaan Olahraga</p> <p>Petualangan, Tantangan dan Wisata</p> <p>1) Rapat Koordinasi Pengelolaan Olahraga Rekreasi</p> <p>2) Fasilitas Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Rekreasi</p> <p>3) Fasilitas Bimbingan dan Pengembangan Olahraga</p> <p>Petualangan, Tantangan dan Wisata</p> <p>4) Fasilitas Pembinaan/Pengembangan Olahraga Rekreasi</p> <p>5) Event Olahraga Rekreasi di Luar Negeri</p>					

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	BO.01.03	d. Pengembangan Ruang Publik Olahraga 1) Rapat Koordinasi Pengelolaan Olahraga Rekreasi 2) Fasilitas pengembangan ruang publik olahraga					
3	BO.02 BO.02.00 BO.02.01 BO.02.02	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga a. Sentra dan Perkumpulan Olahraga 1) Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Sentra dan Perkumpulan Olahraga b. Sekolah Khusus Olahraga 1) Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga c. Pembinaan PPLP	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	BO.02.03	1) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan PPLP d. Pembinaan PPLM 1) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan PPLM					
4	BO.03 BO.03.00 BO.03.01	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus a. Olahraga Tradisional 1) Pengembangan Pembinaan Olahraga Tradisional 2) Fasilitasi Pengembangan Olahraga Tradisional 3) Pemantauan dan Evaluasi b. Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia dan Olahraga Khusus 1) Pengembangan Pembinaan Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia dan Olahraga Khusus	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	BO.03.02	2) Fasilitas Pengembangan Olahraga Usia Dini, Lanjut Usia dan Olahraga Khusus 3) Pemantauan dan Evaluasi  c. Olahraga Penyandang Cacat 1) Pengembangan Pembinaan Olahraga Penyandang Cacat 2) Fasilitas Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat 3) Pemantauan dan Evaluasi					
5	BO.04 BO.04.00	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga a. Kemitraan Dalam dan Luar Negeri 1) Pengembangan Kerjasama Kemitraan Keolahragaan dengan lembaga Pusat dan Daerah	Biasa	Eselon III/ Administra tor	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		2) Fasilitasi dan rintisan pengembangan kemitraan keolahragaan					
	BO.04.01	b. Bimbingan dan Pengembangan Karier Atlit Pelatihan Dasar-Dasar Kecakapan Hidup Bagi Pelaku Olahraga	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
	BO.04.02	c. Penghargaan Olahraga 1) Penghargaan keolahragaan 2) Fasilitasi Penghargaan Olahraga	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	
6	BO.05 BO.05.00 BO.05.01 BO.05.02 BO.05.03	Museum Olahraga Nasional a. Penyusunan rencana program anggaran, b. Pelaksanaan pameran, c. Pemeliharaan dan perawatan, d. Pengamanan benda-benda bersejarah di bidang olahraga.	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Menggangu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7	BO.05.04 BO.06	e. Evaluasi dan pelaporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
IV	RO	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA					Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
1	RO.00 RO.00.00	Pembibitan dan IPTEK Olahraga a. Pemanduan dan Pengembangan Bakat 1) Pemanduan Bakat Cabang Olahraga 2) Identifikasi Bakat Cabang Olahraga 3) Pemusatan Latihan Kontingen <i>Event</i> ASEAN	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RO.00.01	4) Pemusatan Latihan Kontingen <i>Event ASIA</i> 5) Pengembangan Bakat-Olahraga b. Kompetisi Usia Muda 1) Kompetisi Olahraga Junior Tingkat Nasional 2) Kompetisi Olahraga Junior Tingkat Internasional 3) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) dan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 4) Meeting Keolahragaan Tingkat Internasional 5) Kompetisi Olahraga Junior Tingkat ASEAN 6) Kompetisi Olahraga Junior Tingkat ASIA c. Pengembangan IPTEK Olahraga					

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RO.00.02 RO.00.03	(Pengkajian Iptek Olahraga) d. Pemanfaatan IPTEK Olahraga 1) Fasilitas pendayagunaan Iptek olahraga a) Pendayagunaan IPTEK Olahraga b) Pembinaan Atlet Jangka Panjang					
2	RO.01 RO.01.00 RO.01.01	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan a. Peningkatan Mutu Pelatih dan Instruktur 1) Pelatihan Pelatih, Instruktur Tingkat Nasional 2) Pelatihan Pelatih, Instruktur Tingkat Internasional b. Peningkatan Mutu Wasit, Juri dan Tenaga Pendukung	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RO.01.02	<p>1) Fasilitasi Wasit dan Juri dalam pengembangan tenaga keolahragaan</p> <p>2) Fasilitasi Tenaga pendidikan dan pendukung dalam pengembangan tenaga keolahragaan</p> <p>c. Organisasi Keolahragaan</p> <p>1) Fasilitasi Pengelola organisasi keolahragaan dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga</p> <p>2) Pembinaan Induk Organisasi cabang-cabang olahraga prestasi, olahraga fungsional dan profesional yang difasilitasi dalam memenuhi</p>					

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	RO.02 RO.02.00	standar minimal organisasi keolahragaan a) Fasilitasi Pembinaan Induk Organisasi Olahraga dan Lembaga Olahraga Lainnya b) Fasilitasi Pembinaan Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) c) Fasilitasi Pembinaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
RO.02.01	3) Pemetaan Sentra Industri Olahraga b. Inventarisasi dan Manajemen Industri Olahraga 1) Diklat SDM Tenaga Teknis Produk Barang Industri Olahraga 2) Diklat Manajemen Industri Olahraga 3) Diklat Tenaga Teknis Manajemen Promosi dan Pemasaran Industri Olahraga c. Promosi dan Pemasaran Olahraga 1) Penelusuran 2) Fasilitasi event/pameran produk industri olahraga a) Jasa Industri Olahraga dalam bentuk						
RO.02.02							



NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		Event/Kejuaraan Cabang Olahraga b) Promosi dan Pengembangan Industri Olahraga Melalui Media					
4	RO.03 RO.03.00	Olahraga Prestasi a. Olahraga Prestasi Daerah 1) Pembinaan olahraga prestasi daerah 2) Fasilitas penyelenggaraan ajang tunggal ( <i>single event</i> ) olahraga prestasi tingkat daerah. (Fasilitas penyelenggaraan ajang tunggal/ <i>single event</i> olahraga prestasi tingkat daerah)	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RO.03.01	3) Fasilitas Penyelenggaraan pekan olahraga daerah 4) Fasilitas Penyelenggaraan pekan olahraga wilayah 5) Fasilitas Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat wilayah 6) Fasilitas Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat propinsi 7) Fasilitas Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota  b. Olahraga Prestasi Nasional 1) Pengembangan Olahraga Prestasi Nasional 2) Fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi					

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RO.03.02	<p>tingkat nasional (<i>single event</i> dan/atau <i>multi event</i>)</p> <p>a) Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional</p> <p>b) Koordinasi POPNAS dan PON</p> <p>c) Dukungan Penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia</p> <p>3) Fasilitas Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional</p> <p>4) Fasilitas Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional</p> <p>5) Olahraga Prestasi Nasional</p> <p>c. Olahraga Prestasi Internasional</p> <p>1) Fasilitas Pembinaan</p>					

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RO.03.03	<p>2) Fasilitas Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Internasional</p> <p>d. Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional</p> <p>1) Olahragawan andalan nasional</p> <p>2) Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional</p> <p>3) Tata Kelola Kontingen</p>					
5	RO.04 RO.04.00	<p>Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga</p> <p>a. Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan</p> <p>1) Standardisasi bidang keolahragaan</p> <p>(Rancangan Standar Nasional Keolahragaan)</p> <p>2) Akreditasi bidang keolahragaan</p>	Terbatas	Eselon III/ Administrator	Tertutup	Dapat Menimbulkan Dampak Terhadap Kinerja Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		3) Sertifikasi bidang keolahragaan 4) Pemantauan dan evaluasi Peningkatan Standardisasi					
	RO.04.01	b. Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan 1) Fasilitas Sarana Olahraga Pendidikan 2) Fasilitas Prasarana Olahraga Pendidikan 3) Pemantauan dan evaluasi peningkatan infrastruktur olahraga pendidikan	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
	RO.04.02	c. Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 1) Fasilitas Sarana Olahraga Rekreasi 2) Fasilitas Prasarana Olahraga Rekreasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		3) Pemantauan dan evaluasi Peningkatan infrastruktur olahraga pendidikan					
	RO.04.03	d. Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi 1) Fasilitas Sarana Olahraga Prestasi 2) Fasilitas Prasarana Olahraga Prestasi 3) Pemantauan dan evaluasi Peningkatan infrastruktur olahraga Prestasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	
6	RO.05 RO.05.00 RO.05.01 RO.05.02	Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kesehatan Olahraga Nasional a. Kegiatan Antropometri dan kapasitas fisik b. Biomekanik dan kebugaran jasmani c. Kesehatan olahragawan.	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7	RO.06	Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Eselon IV/ Pengawas	Terbuka	Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Lembaga	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI